



Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Bambang Trihartanto Suroyo¹ dan Wiwandari Handayani²

[Diterima: 25 Februari 2014; disetujui dalam bentuk akhir: 23 September 2014]

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberhasilan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo. Metode analisis yang digunakan adalah berupa pengukuran tingkat kesejahteraan petani, skala likert dan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan kawasan agropolitan ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan perdesaan di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini terlihat bahwa tingkat kesejahteraan petani padi, melon dan ketela pohon di kawasan ini masih dibawah rata-rata Kabupaten Kulonprogo. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana agribisnis hulu-hilir seperti bahan baku, alat mesin pertanian, irigasi, pemasaran dan kondisi jalan, sehingga menjadi hambatan utama bagi petani dalam peningkatan produktivitas serta daya beli petani.

Kata kunci: Pengembangan wilayah, pembangunan perdesaan, agropolitan, Kulonprogo.

[Received: February 25, 2014; accepted in final version: September 23, 2014]

Abstract. This study aims to assess the success story of an agropolitan development in Kulonprogo District. The methods used in this research include likert scale and multiple linear regression. The result of the analysis shows that the agropolitan approach has not significantly affected the rural development in Kulonprogo District. Farmers' welfare in the region is still below the average of that of the district. Factors influencing this situation are the availability of upstream-downstream facilities for agribusiness such as raw materials, agricultural machinery, irrigation, marketing and road network, which became the main hindrance for the farmers in improving their productivity and purchasing power.

Keywords. Regional development, rural development, agropolitan, Kulonprogo.

Pendahuluan

Sektor pertanian di kabupaten ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, terbukti bahwa kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 26,87%, dan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebesar 90.873 pekerja atau sekitar 23,37% dari total jumlah penduduk (BPS, 2012). Semenjak ditetapkannya kawasan ini sebagai agropolitan pada tahun 2010, pemerintah daerah belum secara signifikan memberikan dorongan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana agribisnis dari hulu sampai hilir. Minimnya daya dukung tersebut menyebabkan

¹ Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, bambst.s@gmail.com

² Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

lemahnya peran kawasan agropolitan Fase II terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Kulonprogo, serta lemahnya peran sentra-sentra industri pertanian pada kawasan agropolitan yang belum memberikan *trickle-down effect* terhadap sektor-sektor di bawahnya terutama pada hulu dan hilirnya sistem agropolitan (Bappeda Kabupaten Kulonprogo, 2013).

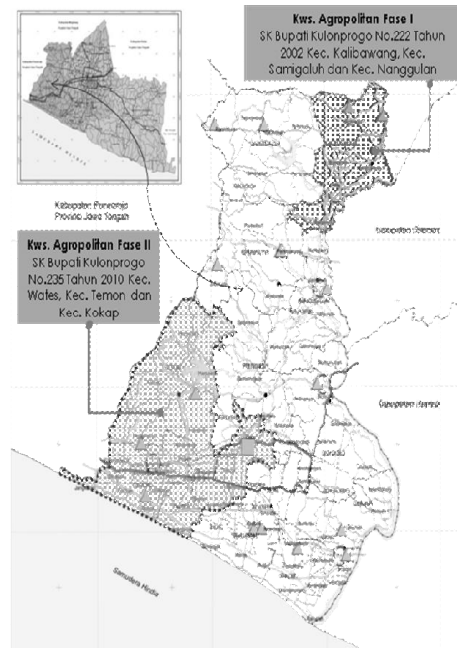
Salah satu konsep perencanaan pengembangan wilayah yang cukup populer pada beberapa dekade di negara-negara berkembang dan agraris seperti Indonesia, adalah konsep pengembangan agropolitan. Friedmann dan Douglass (1975) menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai 150.000 orang. Kawasan perdesaan di Kabupaten Kulonprogo masih didominasi oleh aktivitas pertanian karena memang sektor ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Pada akhirnya di Kabupaten Kulonprogo ditetapkan dua kawasan potensi pertanian menjadi kawasan agropolitan, yaitu Kawasan Agropolitan Fase I (Kecamatan Kalibawang, Samigaluh dan Nanggulan) dan Kawasan Agropolitan Fase II (Kecamatan Temon, Wates dan Kokap) (Bappeda Kulonprogo, 2013).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan Kawasan Agropolitan Fase II terhadap pembangunan desa semenjak ditetapkan pada tahun 2010 melalui SK Bupati Kulonprogo. Hal pertama yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan petani di kawasan ini karena tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian perlu dilakukannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di kawasan ini seperti sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu-hilir. Terakhir adalah mengenai penilaian petani terhadap kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pertanian seperti ketersediaan bahan dan alat mesin pertanian, ketersediaan irigasi, pemasaran dan kondisi jalan. Secara menyeluruh dalam penulisan penelitian ini akan dibahas latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, pengembangan wilayah dan desa berbasis agropolitan, analisis, temuan hasil analisis, sintesa hasil analisis serta kesimpulan dan rekomendasi.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) kawasan perdesaan yang berbasiskan sektor pertanian, agar pembangunan bisa lebih jitu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan sektor tersebut dari hulu sampai hilir. Semenjak ditetapkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, setidaknya penelitian ini bisa menjadi awal pembelajaran kepada pemerintah daerah bagaimana caranya menyusun program pembangunan kawasan perdesaan.

Gambaran Umum

Kawasan Agropolitan Fase II berada di sebelah selatan Kabupaten Kulonprogo dan ditetapkan melalui SK Bupati Kulonprogo No.235 pada tahun 2010 yang meliputi Kecamatan Temon, Wates dan Kokap. Kecamatan Kokap merupakan kecamatan yang terluas yaitu 7.379,95 Ha (BPS, 2013) dibandingkan dengan Kecamatan Temon dan Wates. Namun jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wates yaitu 32.594 jiwa (BPS, 2013). Dalam perda No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Wates merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), selain itu kawasan ini juga merupakan pintu gerbang ke Kabupaten Kulonprogo. Secara spasial kawasan agropolitan di Kabupaten Kulonprogo dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : Bappeda Kab. Kulonprogo, 2013

Gambar 1. Orientasi Wilayah Penelitian

Pengembangan Desa dan Wilayah Berbasis Agropolitan

Friedmann dan Douglass (1975) menawarkan konsep agropolitan sebagai solusi atas terjadinya pembangunan yang tidak berimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Desa dan kota mempunyai peran yang sama dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran kota dan desa tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Rustiadi (2006) menjelaskan bahwa agribisnis merupakan bisnis yang berbasis usaha pertanian yang mengedepankan kekuatan pasar (*market driven*) yang terdiri atas sub sistem hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem hilir dan sub sistem penunjang. Pembangunan wilayah dan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan perdesaan yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Adapun tujuan dan keberhasilan pembangunan desa diantaranya adalah peningkatan pendapatan masyarakat desa (kesejahteraan masyarakat), pengurangan pengangguran masyarakat desa, penyediaan lapangan kerja di perdesaan, pengurangan kemiskinan masyarakat desa, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Kunci keberhasilan pembangunan agropolitan adalah memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai suatu unit tunggal otonom mandiri tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya. Secara spasial penerapan konsep agropolitan sebagai pilihan alternatif dari terjadinya kegagalan pembangunan industri masa lalu, dihadapkan kepada beberapa persyaratan (Harun, 2004, hlm. 3), yaitu:

- Dilibatkannya ratusan hingga jutaan petani perdesaan bersama-sama pengembangan kota-kota pusat pertanian;
- Tidak ada pilihan lain selain berjalannya secara simultan keterlibatan setiap instansi sektoral di perdesaan untuk mengembangkan pola agribisnis dan agroindustri;

- Tercapainya keserasian, kesesuaian dan keseimbangan antara pengembangan komoditas unggulan dengan struktur dan skala ruang yang dibutuhkan;
- Adanya kesinambungan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana wilayah (irigasi, transportasi) antara daerah produksi pertanian dan simpul-simpul jasa perdagangan dalam program perencanaan jangka panjang;
- Realisasi dari pengembangan otonomi daerah untuk mengelola kawasan pertanian secara mandiri termasuk kewenangan untuk mempertahankan keuntungan komparatif bagi penjaminan pengembangan kawasan pertanian;
- Dalam kondisi “*infant-agroindustry*” diperlukan adanya kemudahan-kemudahan dan proteksi terhadap jenis komoditas yang dihasilkan baik di pasar nasional maupun luar negeri;

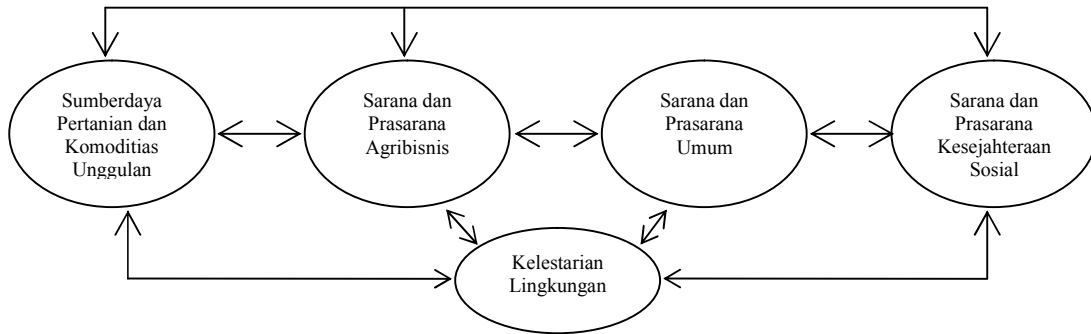
Di Indonesia, agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Kementerian Pertanian, 2002, hlm. 5). Tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan. Konsep pengembangan kawasan agropolitan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian agribisnis;
- Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan;
- Hubungan antara kota dan daerah-daerah *hinterland* atau daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interpendensi/timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi pertanian;
- Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan yang di kota.

Kawasan agropolitan sebagai suatu sistem terdiri dari sub sistem sumberdaya pertanian dan komoditi unggulan, sub sistem sarana dan prasarana agribisnis, sarana dan prasarana umum, prasarana kesejahteraan sosial, dan sub sistem kelestarian lingkungan (Gambar 2). Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan, yaitu satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Pendekatan pembangunan kawasan agropolitan menggunakan pendekatan pembangunan sistem agribisnis. Sistem agribisnis ini mencakup 5 sub sistem (Sutawi, 2002, hlm. 12-13), yaitu : 1) Sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*), yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian; 2) Sub sistem usaha tani (*on farm agribusiness*), yaitu kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas primer; 3) Sub sistem pengolahan (*down stream agrobusiness*), yaitu industri yang

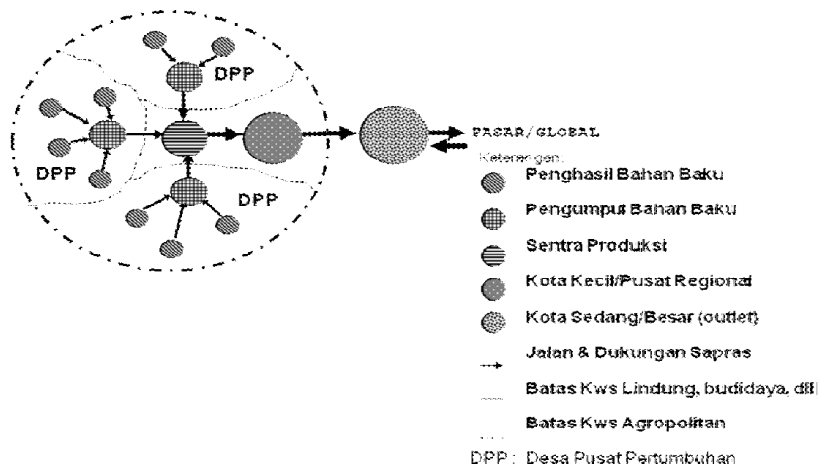
mengolah komoditas primer menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir; 4) Sub sistem pemasaran, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan luar negeri; 5) Sub sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani dan sub sistem agribisnis hilir.



Sumber : Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Kementerian Pertanian, 2002.

Gambar 2. Sistem Kawasan Agropolitan

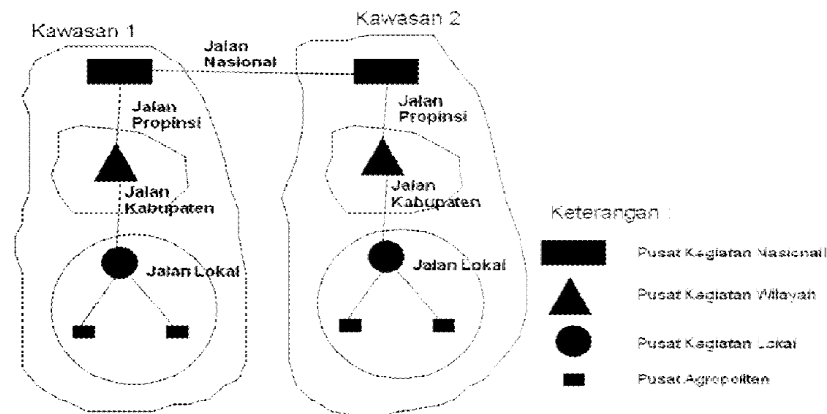
Soenarno (2003), mendefinisikan daerah agropolitan sebagai sistem fungsional pada desa-desa, yang ditujukan dengan keberadaan hirarki ruang diperdesaan, pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya yang membentuk daerah agropolitan. Lihat gambar 3.



Sumber: Soenarno, 2003

Gambar 3. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Soenarno (2003) juga menyatakan sebaiknya daerah agropolitan dihubungkan dengan keberadaan rencana tata ruang tingkat nasional, rencana tata ruang tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten. Hubungan daerah agropolitan dengan pusat aktivitas secara regional pada tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar 4.



Sumber: Soenarno, 2003

Gambar 4. Hubungan Antara Daerah Agropolitan Dengan Pusat Aktivitas Regional

Metode Penelitian

Penelitian tentang kajian pengembangan kawasan agropolitan Fase II untuk mendorong pembangunan desa di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi komoditas unggulan dengan menggunakan kriteria-kriteria seperti tingkat produksi, dukungan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas unggulan, dan jaringan pemasaran, sehingga penelitian ini lebih fokus targetnya terhadap petani komoditas unggulan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah mengidentifikasi produktivitas masyarakat melalui profil pendidikan dan profil tenaga kerja. Ketiga, mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani melalui indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Selanjutnya menganalisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu-hilir terhadap tingkat kesejahteraan petani. Terakhir adalah penilaian dari 115 petani terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu-hilir. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan dalam penetapan komoditas unggulan ini terdiri dari tiga kriteria yaitu:
 - Kriteria unggulan berdasarkan dominasi: merupakan potret sebaran komoditas pertanian per-unit desa yang dapat memperlihatkan dominasi pada masing-masing kecamatan di kawasan agropolitan tersebut, sehingga jumlah produksi di setiap kecamatan dapat diilustrasikan.
 - Kriteria unggulan berdasarkan tingkat produksi: merupakan hasil analisis hirarki yang dapat dilihat dari jumlah produksi terbanyak pada tahun 2012 yang akan menjadi prioritas pengembangannya di kawasan agropolitan tersebut. Selain itu dapat dilihat pada *trend* perkembangan pada masing-masing komoditas unggulan lima tahun terakhir (2008-2012) sehingga dapat diketahui kontribusi masing-masing komoditas terhadap total produksi di Kawasan Agropolitan Fase II serta perbandingannya dengan Kabupaten Kulonprogo.
 - Kriteria unggulan berdasarkan dukungan kebijakan pemerintah: yaitu adanya dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas unggulan tersebut baik dari hulu sampai hilir produksi komoditas unggulan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produksi wilayah.

2. Analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat produktivitas sektor pertanian di Kawasan Agropolitan Fase II Kabupaten Kulonprogo. Dalam hal ini variabelnya adalah pasar/pemasaran sarana dan prasarana pengangkutan/transportasi, jaringan irigasi, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Data primer kuisioner yang telah didapat akan dinilai dengan menggunakan analisis Skala *Likert*. Skala *Likert* disini untuk menilai variabel-variabel yang menjadi pendorong dan penghambat kegiatan pertanian di Kawasan Agropolitan Fase II, Kabupaten Kulonprogo. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skoring Nilai Skala *Likert*

Penilaian	Skala
Sangat Buruk	1
Buruk	2
Cukup Baik	3
Baik	4
Sangat Baik	5

Sumber: Riduwan & Akdon dalam Analisis Statistika, 2010

Tabel 2. Perhitungan Hasil Nilai Skala *Likert*

Sangat Buruk	Buruk	Cukup baik	Baik	Baik sekali
115 x 1 = 115	115 x 2 = 230	115 x 3 = 345	115 x 4 = 460	115 x 5 = 575

Sumber: Riduwan & Akdon dalam Analisis Statistika, 2010

Contoh perhitungan (Riduwan, 2010) adalah sebagai berikut:

Misalnya 115 responden yang melakukan penilaian terhadap kondisi prasarana jalan. Responden yang menjawab sangat buruk (1) = 20 orang, Responden yang menjawab Buruk (2) = 25 orang, Responden yang menjawab Cukup (3) = 15 orang, Responden yang menjawab Baik (4) = 8 orang, Responden yang menjawab Baik Sekali (5) = 2 orang. Dari data tersebut diperoleh total nilai 157. Sebagai tambahan informasi, jumlah skor tertinggi untuk item Baik Sekali ialah $5 \times 115 = 575$, sedangkan item Sangat Buruk ialah $1 \times 115 = 115$. Jadi, jika total skor penilaian responden di peroleh angka 157, maka penilaian responden terhadap kondisi infrastruktur jalan tersebut adalah: $(157/575) \times 100\% = 27\%$, atau bisa dikategorikan sebagai Buruk. Berikut kriteria interpretasi skor :

- Angka 0% – 20% = Sangat Buruk
- Angka 21% – 40% = buruk
- Angka 41% – 60% = Cukup
- Angka 61% – 80% = Baik
- Angka 81% – 100% = Baik sekali

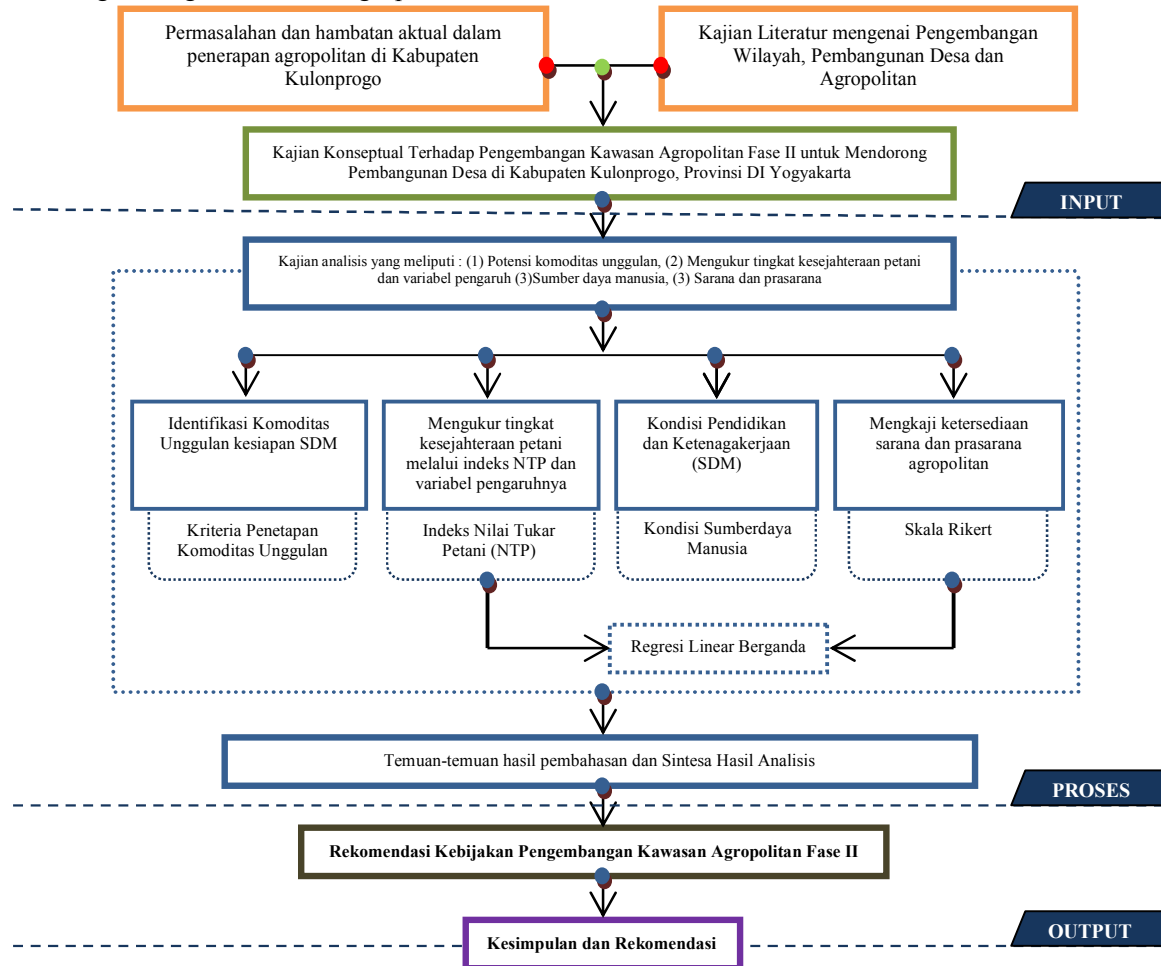
3. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan tingkat kesejahteraan petani yang dilihat melalui perbandingan indeks yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dengan persentase. Sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) menunjukkan perkembangan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan petani. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (BPS Republik Indonesia, 2012).

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

It : harga yang diterima petani
 Ib : harga yang dibayar petani
 NTP : Nilai Tukar Petani

- NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
 - NTP=100, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
 - NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.
4. Analisis Pengaruh kegiatan pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusinya di dalam pengembangan wilayah di Kawasan Agropolitan Fase II, Kabupaten Kulonprogo. Dalam hal ini digunakan analisis *Nilai Tukar Petani (NTP)* dan *Analisis Regresi Linear berganda* untuk mengetahui pengaruh dari faktor faktor yang mempengaruhi yaitu variabel transportasi, irigasi, pemasaran/pasar, dan variabel ketersediaan bahan dan alat secara lokal terhadap hasil NTP petani yang merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen (Riduwan dan Akdon, 2010). Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data NTP yang bersumber dari data Primer yang bersumber pada kuisioner bagi 115 (seratus lima belas) responden. Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari faktor faktor yang mempengaruhi yaitu variabel transportasi, irigasi, pemasaran/pasar, dan variabel ketersediaan bahan dan alat secara lokal terhadap Hasil NTP petani menggunakan SPSS 17 dimana data mentahnya berasal dari hasil kuisioner kepada 15 responden yang tersebar di tiga kecamatan. Kemudian data tersebut dilakukan uji validitas dengan bantuan SPSS 17. Data kuisioner dengan Skala *Likert* tersebut kemudian dianalisis dengan bantuan SPSS 17 untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap hasil NTP petani.
- Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + + bnXn
 Y = variabel terikat (Nilai Tukar Petani)
 X (1,2,3...)= variabel bebas (sarana dan prasarana sub sistem hulu-hilir)
 a = nilai konstanta
 b (1,2,3...) = nilai koefisien regresi

Untuk lebih jelasnya alur penelitian dapat dilihat pada gambar 5.



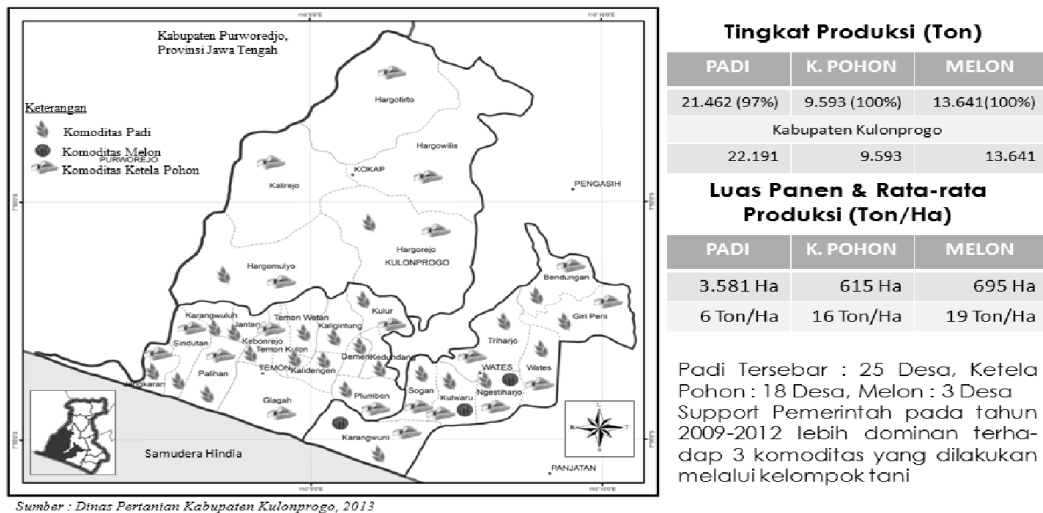
Sumber: Analisis Penyusun, 2013

Gambar 5. Kerangka Analisis

Analisis

Penetapan Komoditas Unggulan

Penetapan komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Fase II ini ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu (1) kriteria unggulan berdasarkan dominasi yang merupakan potret sebaran komoditas pertanian per unit desa yang dapat memperlihatkan dominasi pada masing-masing kecamatan, (2) kriteria unggulan berdasarkan tingkat produksi terbanyak tahun 2008-2012, (3) kriteria unggulan berdasarkan *support* kebijakan pemerintah yaitu adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan komoditas unggulan tersebut baik dari hulu sampai dengan hilir. Dari ketiga kriteria tersebut maka dapat diketahui bahwa padi, ketela pohon dan melon merupakan komoditas unggulan pertanian di Kawasan Agropolitan Fase II, dimana padi memiliki tingkat produksi terbanyak (21.462 ton) serta tersebar di 25 desa, sedangkan melon memiliki tingkat produksi 13.641 ton dengan tersebar di 3 desa dan ketela pohon memiliki tingkat produksi sebesar 9.593 ton yang tersebar di 18 desa.



Gambar 6. Sebaran dan Produksi Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Fase II

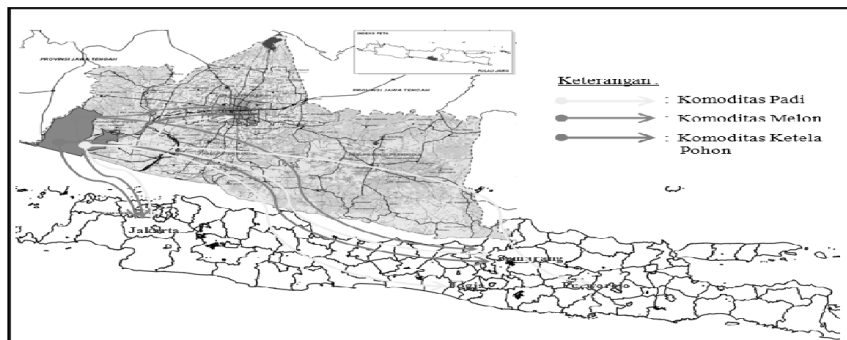
Jaringan Pemasaran Komoditas Unggulan

Jaringan pemasaran komoditas unggulan merupakan gambaran permintaan konsumen terhadap hasil produksi pertanian di kawasan ini yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan gambar 7.

Tabel 3. Jaringan Pemasaran Komoditas Unggulan Padi, Melon dan Ketela Pohon

No	Komoditas Unggulan	Lokasi Permintaan
1	Padi	Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Pasar Kramatjati-Jakarta, Purworejo, Surakarta, Semarang.
2	Melon	Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Pasar Kramatjati-Jakarta.
3	Ketela Pohon	Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Pasar Kramatjati-Jakarta, Semarang

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kulonprogo, Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2013



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kulonprogo, Dinas Pertanian Provinsi DIY, 2013

Gambar 7. Jaringan Pemasaran Komoditas Unggulan Padi, Melon dan Ketela Pohon

Pada tabel 3 dan gambar 7 terlihat jelas bahwa komoditas unggulan padi memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas dibandingkan dengan komoditas melon dan ketela pohon. Peluang pemasaran dari ketiga komoditas unggulan perlu dukungan pemerintah daerah agar lebih meluas lagi jaringan pemasaran, namun di lapangan terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dan melambatnya distribusi produksi komoditas unggulan ini. Yang pertama adalah masih minimnya jumlah pasar di kawasan ini serta belum jelasnya lembaga pelaku pemasaran

sebagai koordinator pemasaran hasil pertanian, yang kedua adalah masih minimnya pasar yang berfungsi sebagai Sub Sentral Agropolitan (SSA) maupun Kawasan Sentral Agropolitan (KSA).

Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa khususnya petani. NTP merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Apabila $NTP > 100$ maka petani untung atau sejahtera, apabila $NTP = 100$ maka petani tidak untung maupun rugi alias impas, dan apabila $NTP < 100$ maka petani mengalami kerugian atau defisit. Dalam penelitian ini NTP yang akan dikaji adalah NTP tingkat kabupaten dan NTP kawasan studi. Adapun NTP di Kabupaten Kulonprogo dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan NTP Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2004-2012

Tahun	Indeks Harga Yang Diterima Petani	Pertumbuhan (%)	Indeks Harga Yang Dibayar Petani	Pertumbuhan (%)	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Pertumbuhan NTP (%)
2004	131,00	-	125,00	-	104,80	-
2005	170,00	29,77	139,00	11,20	122,30	16,70
2006	172,00	1,18	156,00	12,23	110,26	-9,85
2007	189,00	9,88	168,00	7,69	112,50	2,03
2008	213,00	12,70	182,00	8,33	117,03	4,03
2009	210,00	-1,41	203,00	11,54	103,45	-11,61
2010	219,00	4,29	217,00	6,90	100,92	-2,44
2011	238,00	8,68	242,00	11,52	98,35	-2,55
Tahun	192,75	9,30	179,00	9,92	108,70	-0,53

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan KP4K Kulonprogo, 2013

Tabel di atas mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Kulonprogo selama kurun waktu tersebut (2004-2011) relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan indeks nilai tukar petani tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu turun sebesar -2,55%. Semakin menurunnya indeks tersebut merupakan tantangan untuk pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan masyarakat petani bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di kabupaten ini dan perlu adanya penanganan masalah yang menjadi hambatan-hambatan di lapangan. Temuan-temuan di lapangan yang menjadi hambatan produktivitas petani diantaranya: (1) gangguan hama wereng cokelat, penyakit busuk leher dan hama daun bakteri yang terjadi di Kecamatan Temon dan Wates, (2) Mahalnya bibit yang diperoleh dan minimnya alat pengolah pertanian dan lahan pertanian, (3) Lemahnya koordinasi kelembagaan kelompok tani serta lemahnya pemasaran, (4) Minimnya sumberdaya petani untuk melakukan inovasi/ keterampilan dari hasil pertanian yang disebabkan belum adanya pembinaan yang signifikan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kelembagaan yang ada, dan (5) Lemahnya kualitas pelayanan jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan sentra produksi komoditas unggulan ke sub sentra agrobisnis sampai dengan ke kawasan sentra agropolitan untuk siap dipasarkan.

Selain NTP tingkat Kabupaten Kulonprogo, maka untuk NTP di Kawasan Agropolitan Fase II dapat kita lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indeks NTP Di Kawasan Agropolitan Fase II Tahun 2013

Kecamatan	Komoditas Unggulan	Rata-Rata Indeks Harga Yang Diterima Petani (Rp.)	Rata-Rata Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Rp.)	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
Temon	Padi	5.780.500	5.573.840	103,71
	Ketela	1.773.749	1.647.580	107,66
	Pohon	3.777.124	3.610.710	104,61
Wates	Melon	4.375.000	4.281.050	102,19
	Padi	3.520.000	3.373.775	104,33
		3.947.500	3.827.413	103,14
Kokap	Padi	2.484.333	2.460.600	100,96
	Ketela	2.860.000	2.830.250	101,05
	Pohon	2.672.167	2.645.425	101,01
Rata-rata		3.465.597	3.361.183	103,11

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indeks Nilai Tukar Petani dari ketiga kecamatan di Kawasan Agropolitan Fase II secara umum masih rendah dibandingkan dengan rata-rata NTP Kabupaten Kulonprogo. Untuk indeks NTP Kabupaten Kulonprogo 108,70 sedangkan indeks NTP di kawasan ini adalah 103,11. Jika dilihat indeks NTP pada masing-masing komoditas di kawasan ini, komoditas padi di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap paling rendah dibandingkan dengan komoditas padi di desa lainnya yaitu 100,96. Artinya bahwa petani padi di desa tersebut masih mengalami defisit antara pendapatan dan pengeluarannya. Hasil rekapitulasi kuesioner terhadap responden menyatakan bahwa secara umum petani padi di Desa Hargorejo masih mengalami kesulitan bibit unggul, mesin pengolah pupuk, obat hama, mesin pompa dan lemahnya kekuatan pasar. Secara umum NTP ini pada dasarnya banyak dipengaruhi antara lain tingkat produktivitas pertanian, tingkat integrasi usaha hulu-hilir sektor pertanian, pengaruh dan dukungan infrastruktur dan teknologi seperti irigasi, jalan, pemasaran, ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat hama.

Analisis Pengaruh Sarana dan Prasarana Sub Sistem Agribisnis Hulu, Usaha Tani dan Hilir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*the explained variabel*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Di dalam hipotesa masing-masing variabel bebas terdapat tiga uji, yaitu uji t, f dan r:

- Uji t : untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel pengikatnya dalam hal ini adalah NTP;
- Uji f : untuk mengetahui kelayakan penggunaan metode regresi linear berganda terhadap pengaruh variabel bebas dengan NTP;
- Uji r : untuk mengetahui total persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sehingga sisanya merupakan pengaruh faktor lainnya.

Derajat signifikan yang digunakan dalam uji t dan uji f adalah 0,05, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima namun apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis di tolak. Dalam analisis ini variabel terikat adalah rata-rata indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Kawasan Agropolitan Fase II dengan nilai 103,13 dan variabel bebasnya adalah

transportasi/jalan, irigasi, pemasaran dan alat mesin pertanian. Selain itu akan dilakukan juga terhadap dua variabel bebas yaitu pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan petani. Hasil analisis regresi linear berganda dilakukan dengan media spss v17.00. Adapun hasil dari perhitungan regresi linear berganda di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Keterkaitan Sarana dan Prasarana Agribisnis Sub Sistem Hulu, Usaha Tani dan Hilir Terhadap NTP di Kecamatan Temon

No	Kecamatan	Sub Sistem Hulu (Bahan & Alat Mesin Pertanian)	Sub Sistem Usaha Tani (Irigasi)	Sub Sistem Usaha Tani (Pemasaran)	Sub Sistem Hilir (Jalan)	<i>R Square</i>
1	Temon	9,470	6,474	6,945	0,801	0,834
2	Wates	9,203	5,529	7,695	0,222	0,833
3	Kokap	8,622	4,352	7,469	1,696	0,839

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Dari hasil uji t pada regresi linear di atas disimpulkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap adalah variabel sub sistem hulu (bahan baku dan alat mesin pertanian). Kedua adalah variabel sub sistem usaha tani yaitu kondisi irigasi dan pemasaran. Variabel sub sistem hilir tidak memberikan pengaruh terhadap NTP di Kecamatan Temon dan Wates, kecuali di Kecamatan Kokap, khususnya Desa Hargorejo dan Hargowilis dimana kondisi jalan desa disana memberikan pengaruh signifikan terhadap NTP. Sedangkan hasil uji r menjelaskan bahwa total persentase pengaruh keempat tersebut rata-rata sebesar 84%, selebihnya sebesar 16% berasal dari faktor lain seperti masalah koordinasi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan kelembagaan.

Identifikasi Potensi Sumber Daya Manusia dan Struktur Ketenagakerjaan Untuk Mengetahui Produktivitas Masyarakat

Potensi Sumber Daya Manusia

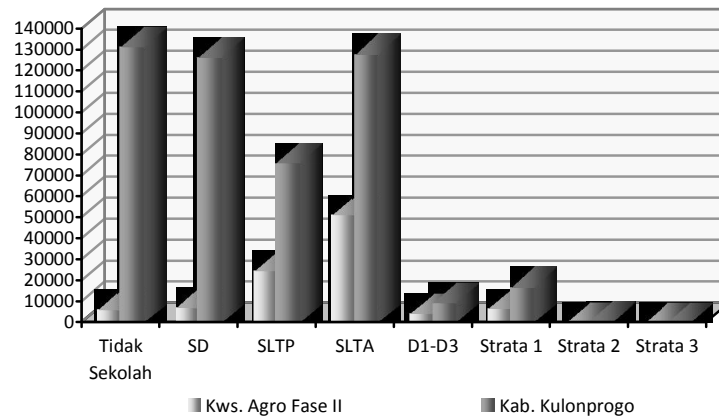
Pada tahun 2012 Kawasan Agropolitan Fase II ini memiliki jumlah penduduk 99.932 jiwa atau sekitar 25,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo. Besarnya proporsi tingkat pendidikan dari jumlah penduduk tersebut cukup mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan agropolitan tersebut. Proporsi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kawasan Agropolitan Fase II dapat dilihat pada tabel 7 dan gambar 8.

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA merupakan yang terbanyak di kawasan ini dengan jumlah 51.071 orang atau 51% dari total seluruhnya. Sedangkan untuk pendidikan tingkat kesarjanaan dari jenjang strata 1 sampai dengan strata 3 masih sangat minim yaitu sebanyak 6.761 orang atau sekitar 6% dari keseluruhan dan itupun yang tertinggi terdapat di Kecamatan Wates atau pusat kota. Selebihnya masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan tingkat SLTP 24.548 orang (24%), kemudian sisanya adalah jenjang terendah yaitu SD ke bawah 13.310 orang atau 13%.

Tabel 7. Jumlah Penduduk di Kawasan Agropolitan Fase II dan Kab. Kulonprogo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No	Tingkat Pendidikan	Kec. Temon		Kec. Wates		Kec. Kokap		Kws. Agro II	Kulonprogo
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Total	Jumlah
1	Tidak Sekolah	1.748	7,12	3.431	7,77	862	2,76	6.041	131.374
2	SD	1.692	6,89	3.135	7,11	2.442	7,82	7.269	126.252
3	SLTP	5.756	23,44	11.090	25,12	7.702	24,66	24.548	75.837
4	SLTA	12.798	52,12	20.396	46,20	17.877	57,24	51.071	127.863
5	D1-D3	1.009	4,11	2.265	5,13	968	3,10	4.242	9.215
6	Strata 1	1.513	6,16	3.735	8,46	1.355	4,34	6.603	16.910
7	Strata 2	34	0,14	80	0,18	22	0,07	136	575
8	Strata 3	5	0,02	14	0,03	3	0,01	22	45
Total		24.555	100	44.146	100	31.231	100	99.932	488.071

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulonprogo, 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulonprogo, 2013

Gambar 8. Tingkat Pendidikan Penduduk Kawasan Agropolitan Fase II Dengan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012

Apabila dilihat perbandingannya dengan Kabupaten Kulonprogo, penduduk yang tidak mengenyam pendidikan cukup banyak yaitu 131.374 orang atau sekitar 26,91%. Kemudian yang terbanyak berikutnya adalah penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA sebanyak 127.863 orang atau 26%, dan disusul dengan tingkat SD sebanyak 126.252 orang atau 25,86%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti D1 sampai dengan Strata 3 masih sangat minim sekali, contohnya untuk tingkat Strata 1 sampai dengan Strata 3 hanya 17.530 orang atau sekitar 3,5%. Hal ini sangatlah jelas bahwa untuk tingkat kabupaten saja penduduk masih sangat perlu ditingkatkan pendidikannya untuk menerima informasi dan mentransfer teknologi demi peningkatan sumberdaya manusia dalam pengembangan agribisnis.

Struktur Tenaga Kerja

Makin besar populasi penduduk yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian, maka semakin besar pula suatu wilayah dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Pada tabel

8 kita dapat melihat *trend* dan perbandingan mata pencaharian masyarakat di Kawasan Agropolitan Fase II dan Kabupaten Kulonprogo seperti di bawah ini.

Tabel 8. Struktur Ketenagakerjaan Kawasan Agropolitan Fase II dan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2012

No	Sektor Kegiatan Utama	Kawasan Agropolitan Fase II				%	Kulon-	%
		2009	2010	2011	2012		progo	
							2012	
1	Pertanian	12.956	13.900	19.725	20.155	63,74	90.873	43,05
2	Pertambangan & Penggalian	127	128	132	136	0,45	3.670	1,73
3	Industri	1.082	1.129	1.329	1.688	5,33	28.324	13,41
4	Listrik & Gas & Air	3	3	3	4	0,01	329	0,15
5	Bangunan/Konstruksi	1.461	1.476	1.545	1.834	5,80	11.490	5,44
6	Perdagangan	2.619	2.679	3.025	3.476	11	44.765	21,20
7	Angkutan	366	388	391	498	1,57	3.099	1,46
8	Lembaga Keuangan	67	69	73	179	0,56	2.546	1,20
9	Jasa Lainnya	3.152	3.172	3.309	3.649	11,54	25.973	12,30
Total		21.833	22.944	29.532	31.619	100	211.069	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulonprogo, 2013

Trend ketenagakerjaan di atas memperlihatkan bahwa semua sektor kegiatan utama mata pencaharian masyarakat di Kawasan Agropolitan Fase II ini selalu mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Dimulai dari sektor kegiatan utama pertanian yang sampai saat ini masih mendominasi sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kawasan Agropolitan Fase II dengan 20.155 orang atau sekitar 63,74%, dan setiap tahunnya terus meningkat. Ketika dilihat perbandingannya dengan Kabupaten Kulonprogo ternyata jumlah tenaga kerja di sektor pertanian juga mendominasi. Maka dari itu, dari informasi tingkat pendidikan dan tenaga kerja dapat disimpulkan bahwa memang kualifikasi tenaga kerja di sektor pertanian tidak terlalu membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi, namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat perlu dilakukan dalam pengelolaan agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*).

Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sub Sistem Agribisnis Hulu, Usaha Tani, dan Hilir di Kawasan Agropolitan Fase II

Dalam analisis ini digunakan penilaian petani terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu sampai dengan hilir yang disempurnakan melalui Skala *Likert* dan dibandingkan dengan informasi mengenai kondisi infrastruktur agribisnis di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap dari lembaga-lembaga pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Rata-Rata Penilaian Petani Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana Agribisnis

No	Kecamatan	Sub Sistem Hulu (Bahan & Alat Mesin Pertanian)	Sub Sistem Usaha Tani (Irigasi)	Sub Sistem Usaha Tani (Pemasaran)	Sub Sistem Hilir (Jalan)	Average
1	Temon	51%	52%	53%	60%	54%
2	Wates	53%	58%	54%	55%	55%
3	Kokap	52%	63%	55%	53%	56%

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel 10. Kondisi Sarana dan Prasarana Agribisnis

No	Kecamatan	Sub Sistem Hulu (Bahan & Alat Mesin Pertanian)	Sub Sistem Usaha Tani (Irigasi)	Sub Sistem Usaha Tani (Pemasaran)	Sub Sistem Hilir (Jalan)	Average
1	Temon	53%	61%	51%	60%	56%
2	Wates	50%	58%	48%	55%	53%
3	Kokap	51%	55%	45%	53%	51%

Sumber : Kabupaten Kuloprogo, 2013

Keterangan : Skoring Skala Likert

0%-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber : Riduwan dan Akdon dalam Analisis Statistika, 2010

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian petani terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu-hilir di Kawasan Agropolitan Fase II dikatakan cukup baik. Begitu juga dengan informasi yang diterima dari beberapa instansi di daerah yang menyatakan bahwa rata-rata kondisi sarana dan prasarana sub sistem agribisnis hulu-hilir di Kawasan ini juga dikatakan cukup baik. Namun kedepan dalam penerapan agropolitan di kawasan ini masih perlu dilakukan pembenahan pada masing-masing sub sistem sehingga penerapan agropolitan di kawasan ini dapat berdampak signifikan khususnya terhadap pembangunan desa di Kabupaten Kulonprogo.

Temuan Hasil Analisis

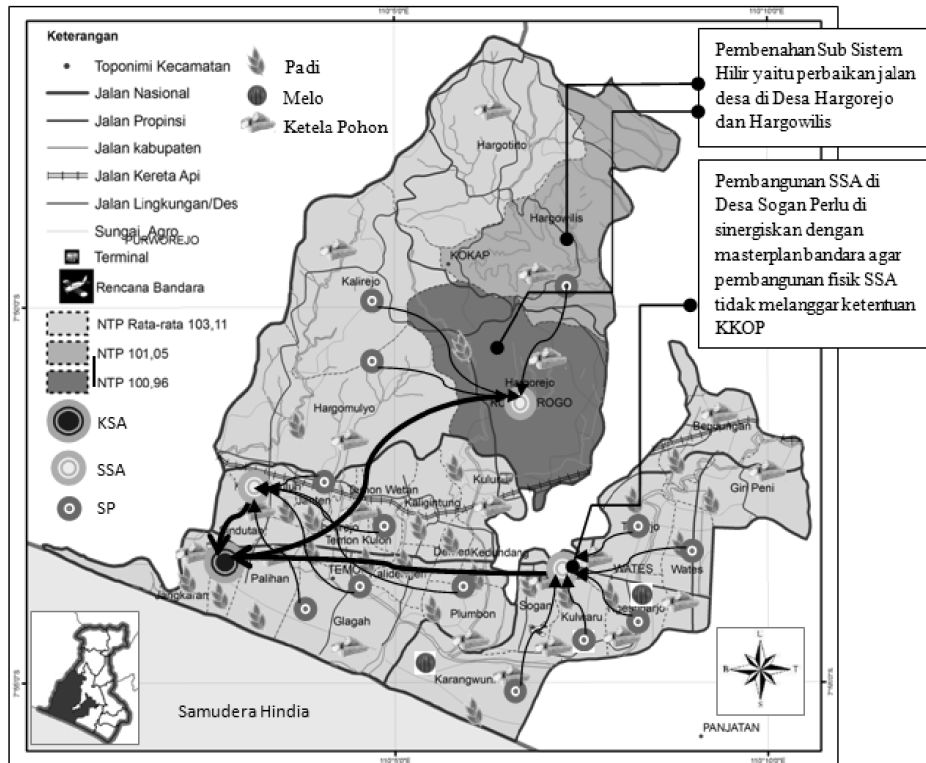
Dari beberapa uraian pembahasan analisis di atas maka terdapat temuan-temuan studi diantaranya :

1. Komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Fase II adalah Padi, Ketela Pohon dan Melon dengan tingkat produksi terbesar adalah padi 22.191 ton yang tersebar di 25 desa dengan luas panen 3.581 Ha;
2. Indeks NTP di kawasan ini (103,13) masih di bawah rata-rata NTP Kabupaten Kulonprogo (108,70). NTP terendah terjadi pada petani padi di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap (100,96) dan NTP tertinggi terjadi pada petani ketela pohon (107,66) di Kec. Temon;
3. Tingkat pendidikan di kawasan ini didominasi SLTA (51.075 jiwa/51%), kedua SLTP (24.548 jiwa/25%). Tenaga kerja terbanyak di sektor pertanian (20.155 jiwa/64%);
4. Total rata-rata hasil regresi linear berganda menjelaskan bahwa variabel ketersediaan bahan dan alat pertanian secara lokal memiliki pengaruh signifikan dengan nilai T (10,023 > 1,661) dan kedua adalah pemasaran (6,152 > 1,661). *R Square* menyatakan bahwa total pengaruh keempat variabel terhadap NTP sebesar 82,7%, selebihnya 17,3% berasal dari faktor lain seperti kelembagaan, pembiayaan dan lain-lain.

Sintesa Hasil Analisis

Pelaksanaan agropolitan Fase II yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo selama ini terbukti belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya petani di kawasan ini secara signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan NTP, terlihat di antara petani dari ketiga komoditas unggulan tersebut bahwa petani padi di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap mengalami defisit yang disebabkan oleh lemahnya daya dukung sub sistem agribisnis hulu seperti bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan alat mesin pertanian. Selain itu kondisi jalan desa di Desa Hargorejo (NTP terendah) ini juga perlu perbaikan, khususnya pada sentra produksi padi yang berfungsi untuk distribusi produksi pertanian.

Pembenahan sub sistem agribisnis hulu merupakan dukungan terhadap ketersediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan alat mesin pertanian yang ditargetkan kepada seluruh kelompok tani di kawasan ini. Sedangkan pembenahan sub sistem agribisnis jasa penunjang merupakan pembenahan dan peningkatan pemasaran di ketiga kecamatan ini. Khusus untuk pembangunan Sub Sentra Agropolitan (SSA) di Desa Sogan, Kecamatan Kokap perlu disinergikan dengan masterplan pembangunan bandar udara agar pembangunan fisik SSA Desa Sogan tidak melanggar ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara sesuai dengan yang telah ditetapkan.



Sumber: Hasil Analisis, 2013

Gambar 9. Pengembangan Kawasan Agropolitan Fase II

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Kajian Pengembangan Kawasan Agropolitan Fase II untuk Mendorong Pembangunan Desa di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta, maka kesimpulan yang dihasilkan:

1. Semenjak ditetapkannya Kawasan Agropolitan Fase II pada tahun 2010 sampai saat ini belum memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa di Kabupaten Kulonprogo, dimana pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan perdesaan yang maju, adil, makmur dan sejahtera (Rustiadi et al, 2006). Hal ini disebabkan oleh masih minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan ini yang terkonsentrasi terhadap isu pemindahan Bandara Internasional Adisucipto di Desa Sogan, Kecamatan Temon sehingga kawasan agropolitan ini bukan lagi prioritas;

2. Melihat bahwa produktivitas masyarakat yang masih bergantung kepada sektor pertanian dalam tulang punggung perekonomian namun tidak didukung oleh SDM yang handal maka perlu peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana sub sistem agribisnis serta inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan penerapan kawasan agropolitan ini;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana sub sistem hulu merupakan hambatan utama dalam pengembangan kawasan agropolitan (Sutawi, 2002, hlm. 12-13) khususnya di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap, sehingga perlu membenahan sarana sub sistem hulu seperti penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan dan alat mesin pertanian;
4. Penerapan konsep agropolitan (Friedmann dan Douglass, 1975) diharapkan dapat mempercepat pembangunan perdesaan dan mampu memberikan pelayanan sosial ekonomi serta berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani khususnya di Kawasan Agropolitan Fase II.

Dari kesimpulan di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan Fase II ini sehingga dapat memberi pengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di Kabupaten Kulonprogo adalah :

1. Perlu dilakukan membenahan sub sistem hulu pertanian yang terkait dengan industri produksi maupun penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dimana bibit unggul seperti untuk komoditas padi, ketela pohon dan melon masih didatangkan dari luar dan belum dapat disediakan secara lokal. Pembenahan ini ditujukan untuk sentra produksi padi, melon dan ketela pohon di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap. Mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan mengembangkan industri benih/bibit di tiap-tiap sentra produksi yang disertai dengan penyuluhan kepada petani sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian.
2. Pembenahan sub sistem usaha tani yang terkait dengan peningkatan kondisi irigasi untuk pengairan ke sentra produksi padi khususnya di Kecamatan Wates dan Temon dan sentra produksi ketela pohon di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap. Peningkatan kapasitas 4 kelompok GP3A sebagai pengelola irigasi teknis dimaksudkan untuk siaga ketika musim kemarau tiba, sehingga pasokan air ke sentra-sentra produksi dapat terpenuhi.
3. Peningkatan produktivitas tanaman melalui inovasi teknologi pertanian penggunaan inovasi teknologi berupa aplikasi Benih Unggul Baru (BUB). Harapan petani sebagai pengguna BUB adalah tersedianya benih sepanjang waktu dengan memperhatikan sasaran penyediaan benih sesuai ketentuan baku yaitu prinsip 7 tepat : 1) tepat varietas/jenis, 2) tepat mutu, 3) tepat waktu, 4) tepat lokasi penyediaan, 5) tepat jumlah, 5) tepat harga (dapat terjangkau) dan 7) tepat target.
4. Pembenahan sub sistem penunjang yang dilakukan dengan penyuluhan serta pendampingan kepada petani melalui balai penyuluhan kelompok tani guna mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan yang dihadapi petani serta pengembangan kompetensi petani dalam hal inovasi produksi hasil pertanian dan penggunaan alat mesin pertanian.
5. Pembenahan Subsektor jasa penunjang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan dan menyediakan jasa yang dibutuhkan seperti pemasaran, irigasi, transportasi, penelitian pengembangan, penyuluhan dan konsultasi. Pengembangan data dan sistem informasi pemasaran hasil produksi pertanian di Kawasan Agropolitan Fase II serta pengembangan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis di Desa Sindutan, Desa Sogan dan Desa Hargorejo sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar domestik dan ekspor atau menurunnya impor.
6. Pembenahan sub sistem hilir terkait dengan peningkatan jalan desa di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap yang merupakan sentra produksi komoditas padi, dimana kondisi jalan desa ini dalam keadaan rusak dan menjadi hambatan terhadap distribusi produksi pertanian. Jalan desa merupakan jalan lokal yang menghubungkan kawasan sentra produksi padi, ketela pohon dan melon dengan kota tani dan kota tani utama, berupa jalan-jalan desa yang dapat

dilalui kendaraan roda empat, berfungsi untuk mengangkut hasil produksi pertanian dari kawasan sentra produksi (KSP) ke kota tani atau kota tani utama.

7. Kedepan diharapkan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan agropolitan ini sehubungan dengan keuntungan lokasi strategis, dilalui jalan nasional pertemuan dua provinsi, dan potensi pembangunan bandara internasional, sehingga peluang jaringan pemasaran akan sangat besar. Selain itu sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat dan *share* sektor terbesar terhadap pembentukan PDRB.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2012) *Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Produsen Gabah, dan Upah Buruh*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. (2012) *Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Douglass, Mike. (1998) A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. *Third World Planning Review* 20 (1).
- Friedmann, John dan Mike Douglass. (1975) *Pengembangan Agropolitan : Sebuah Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Harun, Uton Ruston. (2004) *Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dalam sistem perkotaan regional di Indonesia*. Dalam Rustadi et al. 2006. Kawasan Agropolitan, Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang. Bogor: Crespent Press.
- Kementerian Pertanian. (2002) *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Republik Indonesia. (2007) *Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Rustiadi, Ernan et al. (2006). *Kawasan Agropolitan: Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*. Bogor: Crespent Press.
- Rustiadi, Ernan et al. (2008) *Agropolitan: Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Perdesaan*. Bogor: IPB.
- Rustiadi, Ernan et al. (2011) *Menuju Desa 2030*. Bogor: Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB.
- Rodinelli, D.A. (1985) *Applied Methods of Regional Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy*. Boulder: Westview Press.
- Riduwan dan Akdon. (2010) *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutawi. (2002) *Manajemen Agribisnis*. Malang: Bayu Media dan UMM Press.
- Soenarno. (2003) *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Tarigan, Antonius. (2005) *"Rural - Urban Economic Linkages" Konsep & Urgensinya Dalam Memperkuat Pembangunan Desa*. (Bagian Pertama dari Dua Tulisan). Jakarta: Bappenas